

PADA LIBUR NATARU

Jalan Imogiri-Mangunan Tetap Boleh Dilintasi

YOGYA (KR) - Kasus kecelakaan yang beberapa kali terjadi di Jalan Imogiri-Mangunan, Bantul, menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dan stakeholders terkait lainnya. Kendati demikian Dishub DIY menegaskan, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) wisatawan tetap dapat melintasi di jalan tersebut.

Sebagai langkah antisipasi guna meminimalisasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan, Dishub DIY telah melakukan mitigasi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) berupa pemasangan beberapa rambu larangan, yang juga disertai pemasangan spanduk/banner imbauan pada beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas.

"Kami terus berupa mensosialisasikan informasi mengenai akses jalan masuk dari Imogiri menuju Mangunan terbuka dan aman dilewati. Sosialisasi terkait hal

itu dilakukan Dishub DIY bersama stakeholders terkait. Karena Dishub DIY bersama jajaran terkait, sesuai kewenangan dan ketugasan masing-masing selalu berkomitmen untuk mewujudkan aksesibilitas pariwisata DIY berkualitas dan berkeselamatan," kata Plt Kepala Dishub DIY Wiyos Santoso di Yogyakarta, Rabu (20/11).

Wiyos mengatakan, ruas Jalan Imogiri-Mangunan-Terong-Patuk merupakan ruas jalan yang membelah Kawasan Mangunan. Di ruas jalan tersebut ada tiga segmen,

yaitu Ruas Jalan Imogiri-Dodogan sepanjang 15 km, Jalan Patuk-Terong sepanjang 6 km, dan Jalan Terong-Dlingo sepanjang 6,4 km.

Salah satu titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas pada kawasan tersebut adalah titik Bukit Bego yang terletak di segmen ruas Jalan Imogiri-Dodogan. Di ruas jalan tersebut beberapa laka lantas melibatkan bus pariwisata terjadi, dengan korban mencapai puluhan, antara lain pada 6 Februari 2022 dengan jumlah korban meninggal dunia 14 orang, luka berat 4 orang, dan luka ringan 29 orang. Laka lainnya pada 8 Februari 2024, dengan korban meninggal 3 orang.

"Kami akan terus berupaya memantau dan mengevaluasi aksesibilitas transportasi jalan di Kawasan Mangunan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi lintas sektor dalam as-

pek transportasi wisata di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dan berkesinambungan," terangnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DIY Rizki Budi Utomo menambahkan, pihaknya secara periodik melakukan ramp check bus wisata. Tidak hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pengelola wisata, juga telah menerapkan larangan klakson teletot di kawasan tersebut.

Selain itu dilakukan sosialisasi kepada calon pengguna bus wisata agar memanfaatkan aplikasi Mitra Darat untuk mengecek perizinan angkutan wisata yang akan disewa. Pihaknya akan menggalakan pariwisata berkeselamatan untuk bersama-sama menaikkan jumlah wisatawan di Mangunan dan sekitarnya. (Ria)-f

KASUS NARKOTIKA JARINGAN INTERNASIONAL

Disita, 389 Kg Sabu Senilai Rp 583 M

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus narkotika jaringan internasional Afghanistan-Jakarta dengan barang bukti sabu 389 kilogram (kg) di Jakarta Barat. Kasus tersebut terungkap pada Minggu (17/11) sekitar pukul 11.30 WIB di Parkiran Lapangan RW yang beralamat di Jalan Cengkareng Drain, RT06/04, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

"Diamankan dua orang tersangka berinisial MS (30) dan C (34) dengan barang bukti selain sabu, yakni 1 unit mobil boks, 2 unit ponsel," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11).

Karyoto menjelaskan, para tersangka diperintahkan oleh seseorang berinisial MKS alias Bang (DPO)

untuk pergi dari Sukabumi ke Jakarta menggunakan mobil. Saat tiba di Jakarta, mereka diarahkan ke Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil mobil boks yang sudah terparkir.

"Selanjutnya tim gabungan melakukan pengamatan terhadap sebuah mobil boks dan saat kedua orang tersangka tersebut menaiki mobil boks, tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan," bebernya.

Usai melakukan pengeledahan di mobil boks, tim berhasil menemukan dan menyita 315 bungkus plastik warna putih berisi narkotika jenis sabu seberat total bruto 389 kg. "Dari semua 315 bungkus plastik sabu tersebut terdapat tulisan berhuruf Arab dan cap stempel biru bertuliskan 'Afghan Sabur'. Diduga ba-

rang bukti sabu tersebut berasal dari jaringan Internasional Timur Tengah, Afghanistan-Indonesia (Acheh-Jakarta)," jelas Karyoto.

Saat ini tim gabungan sedang melakukan pengejaran terhadap pengendali narkotika jenis sabu tersebut yang diduga dikendalikan oleh MKS alias Bang. Dari total barang bukti yang diperkirakan mencapai Rp 583 miliar ini berhasil menyelamatkan lebih dari 2,2 juta jiwa generasi penerus bangsa. "Tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) Subsidir pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati," kata Karyoto. (Ant/Has)-f

Dipindahkan

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos, mengatakan, Mary Jane Veloso akan kembali ke Filipina, menyusul negosiasi pihaknya dengan Indonesia selama bertahun-tahun. "Menyusul upaya diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa, kami berhasil menunda pelaksanaan eksekusi matinya hingga tercapainya kesepakatan untuk membawanya pulang ke Filipina," ucap Presiden Marcos.

la mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia atas ikhtikad baiknya terhadap Mary Jane Veloso, yang menunjukkan tingkatnya rasa saling percaya dan eratnya hubungan bilateral.

Menurut Menteri Yusril, Pemerintah Filipina berwenang untuk menentukan kelanjutan pidana Mary Jane setelah dipindahkan, termasuk apabila memberikan grasi atau remisi kepada yang bersangkutan.

Mengingat Filipina merupakan negara yang telah menghapus hukuman

Sambungan hal 1

mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada kemungkinan Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr memberikan grasi kepada Mary Jane.

"Kalau ia sudah dikembalikan ke Filipina, adalah kewenangan Presiden Marcos untuk memberikan grasi. Misalnya, akan diberi grasi seumur hidup, ia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia," papar Yusril.

Yusril mengatakan, pemindahan narapidana ini dilakukan dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, sempat menepis kabar terpidana mati Mary Jane Veloso, yang kini ditahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di Wonosari Gunungkidul itu, bakal bebas.

Dirjen Pemasarakatan memastikan saat ini terpidana mati (Mary Jane

Sambungan hal 1

Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di LP Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Dijelaskan Deddy Eduar, Senin (11/11), Menko Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, HE Gina Alagon Jamoralin. Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati.

Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta April 2010, karena membawa 2,6 kg heroin. Pada Oktober 2010, ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Pada tahun 2014, Mary Jane Veloso pernah mengajukan grasi kepada Presiden RI dan ditolak. Tahun 2015, Mary Jane pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali dengan hasil amar putusan juga ditolak dan tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane ditangguhkan di menit-menit terakhir hingga sekarang. (Ant/Bmp)-d

Dewasa

berbudi pekerti yang luhur, dan sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sepinya negarawan adalah bencana bagi Indonesia.

Hemat saya, bangsa ini dikatakan dewasa dalam bernegara hukum, bila segenap perilakunya berbasis moralitas-religius tinggi. Kedewasaan itu tercermin pada proses, produk, maupun perilaku hukumnya. Perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional, perlu diimbangi kematangan dalam memahami filosofi negara, norma-norma hukum, berikut pengamalannya, dalam segala aspek kehidupan.

Dari kriteria kedewasaan demikian, negara hukum akan mampu mewujudkan keadilan individu maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam falsafah negara (Pancasila) ada nilai-nilai religius. Satu di antaranya tentang sangkan parangin dumadi. Segegap manusia diperkenalkan asal-usul kejadian (penciptaan) oleh Allah Swt, berikut perjalanan kehidupannya, hingga kembali lagi ke haribaan Ilahi Rabbi. Kesadaran bertanggungjawab atas segala amal-perbuatannya, mengharuskan perjalanan hidup di alam dunia, senantiasa berada di shirathal mustaqim (jalan lurus).

Dalam konteks bernegara hukum, makna shirathal mustaqim adalah keseluruhan hukum yang berlaku, dan daripadanya, semua warga-negara mau-

Sambungan hal 1

pun penyelenggara-negara, berbuat demi kejayaan negaranya. Hukum hanya dikategorikan benar, bila dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan, atas dasar nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan.

Itulah shirathal mustaqim bangsa Indonesia.

Sang Pencipta telah memberikan petunjuk dan perintah, ikutilah jalan-Ku. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain. Mengapa? Karena pada jalan-jalan lain itu, rentan terjadi pembelokan-pembelokan. Ada jalan menyimpang. Rambu-rambu lalu-lintas, tidak jelas arah, perintah, dan larangannya. Bila jalan-jalan lain (hukum buatan manusia) yang dipilih dan dilalui, maka ketercerai-beraian pasti terjadi. Sebaliknya, bila jalan (hukum) Allah Swt yang diikuti, maka berbagai kenikmatan (dunia-akhirat) pasti dapat diraih (QS.al-Fatihah 6-7, jo.al-Aniam, 153).

Manusia terpilih, manusia teladan kehidupan sepanjang masa (Muhammad Saw) suatu ketika membuat satu garis lurus. Kemudian bersabda, 'Ini adalah jalan Allah'. Kemudian, dibuatnya pula garis-garis yang banyak. Di samping kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Setelah itu, beliau bersabda, 'Ini adalah jalan-jalan menyimpang. Syetan-syetan menyeru (berbisik, menghasut) agar manusia melewati jalan menyimpang itu' (H.R Ahmad 4142).

Di negeri ini, ternyata hukum sebagai

jalan lurus, mengalami nasib buruk. Keberlakuannya, terus tergeser, tergusur, dan tergantikan dengan hukum sebagai jalan menyimpang. Lembaga negara dan lembaga pemerintahan, berkontribusi pada maraknya jalan menyimpang. Orang-orang dalam-lembaga itu, belum dewasa. Mereka bukan negarawan, melainkan sekadar politisi. Imbasnya, ketika hukum itu dijalankan, maka hasilnya, bukanlah kenikmatan hidup, keadilan, kesejahteraan, melainkan kezaliman. Inilah realitas sehari-hari yang kita rasakan.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kedewasaan bernegara hukum wajib diwujudkan. Untuk itu maka:

(1) Para politisi maupun rakyat seluruhnya, wajib mengendalikannya diri dari dorongan nafsu (nafsu politik, nafsu ekonomi, nafsu sosial, dan nafsu duniawi lainnya), serta-merta kembali ke jalan lurus;

(2) Di jalan lurus, kedewasaan berperilaku mesti dimaksimalkan. Matangkan pemahaman terhadap Pancasila, benahi substansi UUD 1945, berikut koreksi atas regulasi yang ditengarai menyimpang dari moralitas-religius;

(3) Aktualisasikan segala potensi diri, jaga persatuan, dan yg Hb gelorakan musyawarah-mufakat bila ada perbedaan. Wallahu'alam. □ - d

(Penulis, Guru Besar Fakultas Hukum UGM)

Pungli

Pengamanan Lapas Cebongan, dia ASN," ungkap Riski, Rabu (20/11).

Selama kurang lebih setahun atau terhitung sejak 8 November 2022 sampai 16 November 2023, tersangka mendapatkan uang pungli sebesar Rp 730.250.000. Uang itu menurut Kasat, didapatkan dari sekitar 53 orang napi atau tahanan yang telah diminta keterangannya oleh penyidik.

Riski mengatakan, para napi atau tahanan, memberikan uang pungli dengan sistem cash atau dengan cara transfer ke sebuah rekening.

Potensi

Meski demikian, Nezar Patria menegaskan, upaya pemberantasan judi online tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi yang erat dari seluruh lembaga termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal

Sambungan hal 1

Rekening itu milik istri ekspati yang kartu ATM-nya telah dikuasai oleh tersangka.

Terkait pemukulan, menurut Riski, penganiayaan terjadi jika napi atau tahanan tidak menuruti kemauan tersangka. Selain napi atau tahanan, penyidik juga telah meminta keterangan Kalapas Cebongan yang menjabat saat peristiwa dugaan pungli itu terjadi.

"Hasil pemeriksaan terhadap Kalapas yang saat itu menjabat, ia tidak mengetahui tentang aktivitas tersangka. Sampai sekarang, pelaku hanya MRP, namun

Sambungan hal 1

masih kita dalam apakah ada pihak lain yang terlibat. Selain mengamankan tersangka, sejumlah barang bukti juga disita antara lain, layar monitor, CCTV dan telepon seluler," ungkap Riski.

Kalapas Cebongan Kelik Sulistyanto mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman. "Kami sudah melakukan pemeriksaan internal terkait SOP dan tersangka sudah diberhentikan sementara. Untuk sanksi tetap, menunggu vonis pengadilan," ujarnya. (Ayu)-d

Pengoplos

Mereka mendapatkan ide dan mengetahui cara mengoplos elpiji karena salah satu dari tersangka, pernah bekerja di sebuah SPBE di Bali.

Sambungan hal 1

"Kami menyita puluhan tabung gas dan kendaraan yang digunakan oleh kedua tersangka sebagai sarana untuk membeli dan menjual gas oplosan," pungkasnya. (Ayu)-d

4 Meninggal

la menyampaikan, kalau hujan tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh mengemankan aset atau apapun. Untuk sepeda motor yang tertindih batu tidak boleh diambil karena akan membuat batu bergeser. Pada kejadian longsor Selasa (19/11), di lokasi tersebut batu besar menimpa show room dan rumah milik Subur.

Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) menyatakan, tanah longsor terjadi setelah wilayah Desa Pliplan, Bruno, diguyur hujan cukup panjang sejak Selasa (19/11) sore. Hujan membuat medan perbukitan menjadi labil dan runtuh runtuh menimbun yang ada di bawahnya. Satu rumah rusak tertimbun material longsor tersebut.

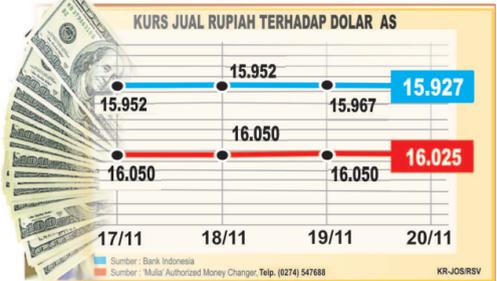
"Warga di sekitar lokasi dalam pendampingan BPBD Purworejo. Mereka diminta

Sambungan hal 1

untuk waspada potensi longsor susulan mengingat hujan diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan," kata

Sambungan hal 1

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencananaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta. (Ant/San)-f



Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	Cerah Berawan	Cerah Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	22-30	65-95
Sleman	Cerah Berawan	Cerah Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	22-29	65-95
Wates	Cerah Berawan	Cerah Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	22-29	65-95
Wonosari	Cerah Berawan	Cerah Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	22-30	65-95
Yogyakarta	Cerah Berawan	Cerah Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	22-30	65-95

Jalan Terjal Swasembada Pangan

Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

SWASEMBADA pangan telah lama menjadi cita-cita besar bagi Indonesia, sebuah negara agraris dengan sumber daya alam melimpah. Dalam sejarahnya, pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi tonggak penting yang mengukuhkan Indonesia di mata dunia. Namun, setelah momen

tersebut, perjalanan menuju kemandirian pangan kerap terjal, penuh dengan tantangan yang kompleks, mulai dari degradasi lahan, perubahan iklim, hingga persoalan kebijakan.

Meski demikian, di tengah berbagai kendala, ada contoh baik yang dapat menjadi inspirasi untuk kembali mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Artikel ini mengupas tantangan sekaligus praktik terbaik yang bisa diterapkan untuk mengukuhkan kedaulatan pangan bangsa.

Mengapa Swasembada Pangan Penting?

Swasembada pangan bukan hanya soal produksi yang mencukupi kebutuhan nasional. Lebih dari itu, ini adalah tentang kedaulatan, stabilitas sosial, dan keamanan negara. Negara yang bergantung pada impor pangan akan sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional, konflik geopolitik, atau krisis global seperti pandemi yang dapat mengganggu rantai pasok.

Lebih jauh, swasembada pangan juga berkaitan dengan kesejahteraan petani lokal. Ketika produksi pangan dalam negeri meningkat dan didukung

kebijakan yang berpihak pada petani, kesejahteraan mereka otomatis terangkat. Ini menciptakan siklus positif yang mendukung pembangunan ekonomi pedesaan.

Jalan Terjal Menuju Swasembada Degradasi Lahan Pertanian

Salah satu tantangan utama adalah berkurangnya lahan pertanian produktif. Urbanisasi yang masif mengubah sawah menjadi kawasan pemukiman atau industri. Data menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan ribuan hektare lahan pertanian setiap tahun.

Ketergantungan pada Impor

Dalam beberapa dekade terakhir, impor pangan Indonesia terus meningkat, terutama untuk komoditas seperti gandum, gula, dan kedelai. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara produksi lokal dan kebutuhan konsumsi yang terus bertambah.

Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim semakin terasa dalam sektor pertanian. Curah hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, dan serangan hama menjadi ancaman nyata bagi produksi pangan.

Kurangnya Dukungan Infrastruktur

Infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan desa, dan fasilitas pascapanen, masih menjadi persoalan. Banyak petani yang tidak dapat mengoptimalkan hasil panennya karena kurangnya akses ke teknologi modern.

Ketimpangan Kebijakan

Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang berpihak pada petani sering kali menjadi batu sandungan. Subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran atau rendahnya insentif bagi petani lokal membuat mereka sulit bersaing.

Contoh Baik dari Praktik Swasembada

Meskipun tantangannya besar, ada beberapa contoh baik dari daerah di Indonesia dan negara lain yang berhasil mendekati swasembada pangan:

Kesuksesan Banyuwangi dengan Smart Farming

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah menjadi salah satu pelopor dalam penerapan smart farming. Melalui teknologi berbasis Internet of Things (IoT), petani dapat memantau kondisi lahan, cuaca, dan kebutuhan air secara real-time. Hasilnya, produktivitas padi di

daerah ini meningkat secara signifikan.

Program Desa Mandiri Pangan di Nusa Tenggara Timur

Di NTT, desa-desa mandiri pangan telah dibentuk dengan pendekatan lokal. Masyarakat diajak mengembangkan tanaman pangan sesuai dengan kondisi wilayah, seperti sorgum dan umbi-umbian, yang lebih tahan terhadap kekeringan.

Keberhasilan Thailand dalam Produksi Beras

Thailand, salah satu eksportir beras terbesar di dunia, menunjukkan bagaimana dukungan pemerintah terhadap petani dapat memberikan hasil luar biasa. Dengan subsidi harga gabah, teknologi pertanian, dan pasar yang stabil, petani di Thailand memiliki insentif tinggi untuk meningkatkan produksi.

Sistem Pertanian Terpadu Jepang

Jepang mengadopsi sistem pertanian terpadu yang memanfaatkan setiap sumber daya secara maksimal. Bahkan lahan kecil dapat menghasilkan output yang tinggi melalui teknologi intensif, diversifikasi tanaman, dan integrasi dengan peternakan.

Langkah Strategis untuk Mencapai Swasembada

Belajar dari tantangan dan contoh baik, berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh Indonesia:

Penguatan Teknologi Pertanian

Pemerintah harus mendorong adopsi teknologi modern, seperti drone untuk pemantauan lahan, sensor untuk irigasi otomatis, dan varietas benih unggul.

Revitalisasi Lahan Pertanian

Melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi adalah prioritas. Kebijakan zonasi pertanian yang tegas harus diterapkan, disertai insentif bagi daerah yang menjaga lahan sawahnya.

Diversifikasi Pangan

Tidak hanya beras, masyarakat perlu didorong untuk mengonsumsi sumber karbohidrat lain, seperti jagung, ubi, atau sagu. Diversifikasi ini mengurangi tekanan terhadap satu komoditas sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

Kolaborasi dengan Swasta dan Komunitas Lokal

Kemitraan dengan sektor swasta

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi dapat mempercepat swasembada. Di sisi lain, pemberdayaan komunitas lokal melalui program desa mandiri pangan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Kebijakan Berpihak pada Petani

Harga yang layak untuk hasil panen, akses kredit yang mudah, dan subsidi pupuk yang tepat sasaran adalah elemen penting dalam mendorong produktivitas petani. Jalan menuju swasembada pangan memang tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Dengan belajar dari tantangan dan mengambil inspirasi dari keberhasilan daerah atau negara lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali mencapai kemandirian pangan. Kunci utamanya adalah kolaborasi yang erat antara pemerintah, petani, swasta, dan masyarakat. Dengan komitmen bersama, cita-cita swasembada pangan tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tetapi juga kenyataan masa depan yang membanggakan.